

SISTEM REKRUTMEN DAN PENGKADERAN ANGGOTA PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA TAHUN 2009 – 2014

Adi Widardo Wicaksono¹⁾, Amaliatulwalidain²⁾

^{1),2),3)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129
Email : adisaturnuz@gmail.com¹⁾, amaliatulwalidain@gmail.com²⁾

ABSTRACT

Golkar is a democratic party that is committed to democracy . A party which is actually a major party has a solid infrastructure, entrenched, loyalty , and responsive , already quite experienced in Indonesia in recruiting cadres - cadres to be positioned in the organizational structure and placed in the government , and has a track record of its own citizens to assess how football the party exploits over the years. Recruitment and regeneration by political parties is a continuation of the function seize , retain and use power . The results obtained from this study were (1) Class work in recruiting new members do not have runway specific rules and conditions. Specific requirements that must be owned by a person to become a member of the party was not there. All requirements specified in the work group are general and not difficult for citizens to join the party. (2) in the recruitment and cadre, Golkar recruited all segments of society. In the face of the Golkar had training in the training of cadres in which party members will be given the political education that will better political knowledge. (3) recruitment and cadre are used Golkar is a system Stelsel active, ie a system that implements that every person who wants to become the party cadres to be active, the implementation of regeneration system Golkar is through four processes, namely: Withdrawal (Recruitment), Selection process , Political Education, and Development.

Keywords : *Recruitment, Cadre, Golongan Karya*

1. Pendahuluan

Pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil Perubahan UUD 1945 tahun 1999 - 2002 mengamatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan - jabatan politik dalam Pemerintahan (eksekutif), Perwakilan (legislatif), dan Peradilan (yudikatif) baik ditingkat Pusat maupun Daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos -pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

Dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat, mekanisme demokratis yang lebih luas adalah pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada). Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sedangkan Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik merupakan saranapartisipasi politik masyarakat

dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. Memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganiskan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan diidil kepada para anggotanya.

partisipasi politik bisa muncul dalam beberapa bentuk. Setiap bentuk – bentuk partisipasi politik akan berisikan gaya, tuntutan, pelaku dan sampai pada tindakan – tindakan yang dilakukan warga negara dalam konteks politik. Selain itu juga berkenaan dengan jumlah orang yang terlibat dalam bentuk – bentuk partisipasi politik, tidak harus selalu dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi bisa juga dilakukan oleh hanya satu orang (Amaliatulwalidain, 2017).

Partai Golongan Karya adalah partai yang demokratis yang memiliki komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis dan terbuka maka hanya Partai Golongan Karya yang demokratis dan terbuka pula yang akan mendapatkan dukungan rakyat. Dengan kata lain, Partai Golongan Karya hanya akan bertahan dan berjaya jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis, dan berjuang untuk

demokrasi. Sebuah partai yang notabene adalah partai besar mempunyai infrastruktur yang solid, mengakar, loyalitas, dan responsif, sudah cukup berpengalaman di Indonesia dalam merekrut kader - kadernya untuk diposisikan dalam struktur organisasi maupun ditempatkan di pemerintahan, dan mempunyai *track record* tersendiri dimana masyarakat bisa menilai bagaimana sepak terjang partai tersebut selama ini. Sampai saat ini pun jebolan tokoh besar dan partai - partai nasional merupakan tokoh dari pada kader - kader Partai Golongan Karya, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, dari Partai Nasdem Surya Paloh, dari Partai PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo dan beberapa tokoh - tokoh lainnya. Sebagai partai modern, Partai Golongan Karya memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merealisasikan doktrin, visi, misi, platform dan pokok program perjuangannya. Melihat potensi historis Partai Golongan Karya telah berusia lebih dari setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan - kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan, Partai Golongan Karya memiliki pengalaman yang panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik dibidang pemerintahan, legislatif, yudikatif. Serangkaian perjalanan panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa dimiliki oleh Partai Golongan Karya.

Partai Golongan Karya berpijak pada landasan (*platform*) tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya dari pijakan ini maka Partai Golongan Karya berwawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Landasan tersebut yang menjadi acuan dan arah dari mana dan kemana perjuangan Partai Golongan Karya hendak menuju. Dengan landasan ini maka Partai Golongan Karya terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai Golongan Karya diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik.

Sebagai Partai Politik, partai Golkar berkewajiban untuk menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, melakukan rekrutmen dan mengembangkan kepemimpinan yang diabdikan bagi kepentingan organisasi, maupun kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Adalah penting dan mendesak bagi partai untuk menyediakan kelompok kader pada semua strata organisasi yang memiliki keahlian profesional, kemampuan intelektual, kepekaan social ang tinggi, serta keterampilan operasional sesuai dengan kedudukan dan tantangan dalam lingkup local, regional, nasional maupun global. Disamping itu, kader - kader tersebut memiliki tanggung jawab, berdisiplin, militant, moralitas, dan kesetiaan yang tinggi pada organisasi. Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 KM dengan jumlah penduduk tahun 2004 sebanyak 451.701 jiwa dan erdiri 11 kecamatan

dengan desa/kelurahan/UPT yang berjumlah 204, oleh karena itu sangatlah tepat DPD Partai Golkar TK.I Sumatera Selatan menetapkan kebijakan pendidikan dan latihan teritorial desa/kelurahan di kabupaten Musi Banyuasin dalam mengembangkan sumber daya manusia partai dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencapaian program partai Golkar TK.I Sumatera Selatan. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih control atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang didalamnya terjadi kompetisi antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandate pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Pelayanan publik dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sering kali terlihat dilapangan aparatur birokrasi yang melayani kepentingan public masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat (Rendy Suestra Canaldhy, 2016).

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik (legislatif dan eksekutif) - yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu - harus mengelola sumberdaya ekonomi-politik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk masyarakat.

Di sisi lain partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Selama ini ada argumen bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi DPRD sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Karena Undang-undang pemilihan umum sekarang telah menerapkan sistem proporsional terbuka, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses rekrutmen parlemen. Tetapi undang-undang itu akan menjadi barang yang mati kalau tidak aksi konkret yang lebih maju dalam proses rekrutmen. Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. Pertama, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Fungsi rekrutmen ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik. Pada pelaksanaan pemilu 2014 partai politik bukan hanya dituntut untuk menjadi partai pemenang pemilu, namun lebih dari itu partai politik harus mampu menempatkan kader-kader yang benar-benar mampu dan memiliki akseptabilitas, kredibilitas, akuntabilitas dan kualitas bakal calon sebagai indikator utama dalam rangka untuk meningkatkan popularitas partai dimasyarakat. Kader-kader tersebut tidak akan didapatkan apabila partai politik hanya melakukan proses rekrutmen seperti menyiapkan kader - kader berdasarkan hubungan dekat dan popularitas saja yang dapat masuk menjadi kader yang akan disiapkan untuk mengisi jabatan politik tersebut.

A. Pokok Permasalahan

Untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis menyusun identifikasi masalah. Bagaimana mekanisme rekrutmen dan pengkaderan partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Kota Musi Bayuasin?

B. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan fungsi rekrutmen politik oleh partai politik. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen politik dan pengkaderan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Golongan Karya Kota Musi Banyuasin.

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu Suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih, biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.

Berdasarkan pengertian diatas, maka metode deskriptif tidak hanya sekedar menggambarkan saja, tetapi juga melakukan analisa dan interpretasi terhadap data yang didapatkan namun tidak sampai pada pengujian hipotesis.

Data yang telah berhasil peneliti peroleh dari Dewan Pimpinan Partai Politik Golongan Karya Kota Musi Banyuasin diolah kebenarannya dan kelengkapannya. Jika terdapat data yang masih diragukan dan masih ada data yang diperlukan, peneliti kembali ke partai tersebut atau bertemu langsung dengan salah satu kepengurusan partai di tempat yang berbeda untuk mendiskusikan dan melengkapinya. Setelah data yang diperoleh cukup menyakinkan kebenarannya dan kelengkapannya, data

kemudian diolah dan diajukan dalam bentuk tabel dan gambar dan selanjutnya peneliti memberikan analisisnya.

D. Kerangka Teori

Menurut Carl J. Friedrich partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

Menurut R.H Soltou partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar berdiri pada akhir era kepemimpinan Presiden Soekarno. Guna menghadapi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang terdiri dari pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan yang dihimpun oleh golongan militer khususnya Angkatan Darat. Sekber Golkar merupakan sebuah tempat bagi golongan fungsional yang tidak terpengaruh akan politik tertentu.

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Maksudnya adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak-banyaknya calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

2. Pembahasan

A. Sistem Rekrutmen Untuk Menjadi Anggota Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Banyuasin

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.

Rekrutmen anggota Partai Golkar dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi partai kepada masyarakat kabupaten musy Banyuasin untuk menampilkan eksistensi partai dalam menghadapi pemilu. Bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota caranya cukup mudah, hanya mengisi formulir keanggotaan serta menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kemudian akan dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan, implementasi rekrutmen calon anggotapartai Golkar dilakukan melalui tahap penjangkaran, tahap penyaringan, dan tahap penetapan berdasarkan syarat-syarat yang telah diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara didapat dua sistem yang digunakan dalam rekrutmen politik partai ini. Sistem pertama yaitu sistem rekrutmen politik terbuka yang digunakan untuk merekrut anggota partai kader partai Golkar di Musy Banyuasin. Penerimaan kader partai ini bersifat terbuka, artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dll. Penerimaan kader ini diawali dengan pengisian surat pernyataan anggota partai Golkar di sertai fotokopi data diri seperti KTP, SIM atau KTM bagi mahasiswa.. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke DPD, atau DPW partai Golkar. Setelah berkas diterima, pihak partai kemudian akan mengirimkan data ke DPP. Pengiriman data yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan KTA partai dari DPP.

Sistem kedua yaitu sistem tertutup yang digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan baik di internal partai maupun jabatan-jabatan pemerintah. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak Golkar. Contohnya apabila akan ditentukan calon pimpinan DPD calonnya hanya dari pengurus yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPD itu sendiri. Pemilihan dilakukan pada saat rapat kerja DPD, yang pemilihnya adalah seluruh anggota DPD.

B. Proses Rekrutmen Partai Politik Golongan Karya Di Kabupaten Musi Banyuasin

Tindakan yang harus diambil antara lain adalah :

1. Membentuk tim rekrutmen
2. Menentukan kelompok sasaran-konstituen mana yang akan direkrut (pemuda, perempuan, penduduk, kota/desa, pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan)
3. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen
4. Menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan
5. Menetapkan waktu dan lokasi perekrutan
6. Membangun sistem dan *database* keanggotaan. Menentukan sistem tepat untuk partai dengan menjawab pertanyaan berikut :
 - a. Siapa yang boleh menjadi anggota ?
 - b. Apakah anggota harus membayar iuran ?
 - c. Apakah anggota diberikan kartu identitas anggota?
 - d. Data apa saja yang disimpan ?
 - e. Siapa yang bertanggung jawab ?
7. Menggaji staf profesional untuk mengurus beberapa pekerjaan partai yang tidak dapat dilakukan oleh anggota biasa, seperti akuntansi, staf sekretariat, kehumasan, menejer kampanye pemilu, penelitian dan pengembangan partai, pengorganisasian acara partai yang besar.
8. Menjaga supaya anggota tetap aktif dan bermotivasi tinggi
9. Melakukan aktivitas pelatihan secara rutin. Membangun program pelatihan dan memperhatikan isu-isu berikut :
10. Introduksi mengenai ideologi, visi dan misi, program dan gagasan partai.
11. Pengajaran sistem politik dan undang-undang yang berkait
12. Fungsi dan struktur partai politik
13. Membuat anggota merasa puas dan merasa memiliki partai.

C. Syarat Calon Anggota Partai Golongan Karya di Musy Banyuasin

Syarat-syarat untuk menjadi anggota partai Golongan Karya, yaitu

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
3. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan partai lainnya; dan,
4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota;
5. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat Keanggotaan, antara lain yang berasal dari Purnawirawan TNI dan POLRI serta Pensiunan PNS, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

D. Hak dan Kewajiban Calon Anggota Partai Golongan Karya di Musy Banyuasin

1. Setiap Anggota berhak :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama;

- b. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - c. Memilih dan dipilih;
 - d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
 - e. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
 - f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
2. Setiap Anggota berkewajiban :
- a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Partai Golongan Karya;
 - b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
 - d. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai;
 - e. Membela kepentingan partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
 - f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
 - g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
 - h. Membayar Iuran Anggota.

E. Sistem Pengkaderan Untuk Menjadi Anggota Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem rekrutmen dan pengkaderan yang digunakan Golongan Karya adalah sistem Stelsel aktif, yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi kader partai harus aktif, implementasi sistem kaderisasi Golongan Karya adalah melalui empat proses yaitu : Penarikan (Rekrutmen), Proses seleksi, Pendidikan Politik, dan Pengembangan.

Partai Golkar dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik menempatkan proses kaderisasi sebagai bagian utama aktivitas organisasi. Kesadaran ini dibangun atas suatu harapan bahwa proses pengkaderan yang mantap akan melahirkan kader yang berkualitas dalam jumlah yang memadai, sehingga mampu mendorong dinamika Partai Golkar dalam melaksanakan program, menuju pencapaian tujuan partai. Tantangan yang mengemuka dalam dinamika politik dewasa ini yang dihadapi Partai Golkar adalah bagaimana Partai Golkar dapat melakukan kegiatan kaderisasi dan pelatihan secara terencana, berkesinambungan, terintegrasi, mencakup seluruh jenis dan jenjang pengkaderan dan pelatihan yang dapat menjangkau semua semua jenjang organisasi dan mampu mencapai target yang ditetapkan. Proses kaderisasi yang dijalankan Partai Golkar Kabupaten Musi Banyuasin secara internal meliputi tiga kategori pengkaderan yaitu

1) Pengkaderan Umum

Pengkaderan umum merupakan pengkaderan politik yang bersifat structural maupun fungsional. Pengkaderan yang bersifat structural adalah pengkaderan yang dilakukan ditingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Lemabga Pengelola Kaderisasi LPK) Partai Golkar sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan

pengkaderan yang bersifat fungsional adalah perkaderan yang diikuti oleh kelompok-kelompok fungsional berdasarkan pengelompokan strategis (pemuda, perempuan, pengusaha, toho agama, tani, nelayan, cendekiawan, pendidik, pers, pekerja, seniman/budayawan), yang pelaksanaannya dilakukan oleh sekelompok strategis yang bersangkutan bekerja sama dengan LPK sesuai dengan tingkatannya. Pengkaderan ini ditujukan untuk kader madya. Yaitu kader penggalang dan kader fungsional.

2) Pengkaderan Khusus

Pengkaderan khusus adalah pengkaderan yang diselenggarakan oleh partai yang ditujukan kepada kader-kader yang akan dan atau sedang menduduki posisi-posisi tertentu (jabatan politik pada legislatif, eksekutif, maupun jabatan-jabatan fungsional kemasyarakatan lainnya) dalam rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan partai yang dilaksanakan oleh LPK sesuai dengan tingkatannya.

3. Kesimpulan

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Maksudnya adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak-banyaknya calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang didalamnya terjadi kompetisi antarpolisi dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Mengikuti logika demokrasi, pada pejabat politik (legislatif dan eksekutif) yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu harus mengelola sumber daya ekonomi-politik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk masyarakat.

Pengkaderan ini ditujukan untuk kader calon politisi, yaitu kader pemerintahan dan kader penggerak partai. Proses pengkaderan Partai Golkar melibatkan kader atau anggota partai dan peserta pengkaderan sesuai dengan jenis pengkaderan Partai Golkar. Dalam proses menciptakan Partai Golkar yang mampu menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat maka pengembangan sumber daya manusia terus ditingkatkan. Namun, Partai Golkar belum mampu untuk menyediakan kelompok kader pada semua tingkatan organisasi, ditambah lagi kader-kader tersebut masih banyak yang belum memiliki tanggungjawab dan kesetiaan yang tinggi. Maka dari itu, pendidikan politik yang terukur dan terarah sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan berperan dalam mempersiapkan kader-kader partai. Adapun tujuan kaderisasi Partai Golkar yaitu menjaga kesinambungan partai, terjadi regenerasi yang alamiah dan menghasilkan kader yang militan, kompeten dan disiplin.

Daftar Pustaka

- Hendriyusi dengan judul *pelaksanaan rekrutmen politik pada partai politik (studi kasus pada rekrutmen anggota legislatif priode 2004-2009 oleh dewan pimpinan cabang partai demokrasi di indonesia perjuangan pada kota bandung)*.
- Muhamad Imam Akbar Hairi dengan judul *(faktor-faktor komunikasi politik kader golkar yang berpengaruh terhadap peningkatan suara pemilih Golkar pada pemilu 1992)* Universitas Indonesia, Jakarta.
- Roni Tamara Saputra dengan judul *sistem kaderisasi dan penetapan calon anggota legislatif dalam pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)*.
- Pamungkas, *Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hal.90
- Wawancara dengan bapak M. Rusli Mahdi selaku sekretaris DPD Golongan Karya Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 16 September 2015.
- DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Banyuasi Amaliatulwalidain dengan judul *Peran dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Menginternasasikan Kebijakan Berperspektif Gender di Kota Palembang Tahun 2016*.
- Rendy Suestra Canaldhy.2016. Dengan judul. *Kinerja Organisasi Pelayanan Publik di Pemerintahan*.